

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DESA WISATA KALONGAN DI KABUPATEN SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH

JURNAL ILMIAH

diajukan guna memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Pendidikan Diploma IV
pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri



oleh

ANGESTI NINDYA CAHYANINGRUM

NPP. 28.0629

Program Studi : Politik Pemerintahan

**INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
JATINANGOR, 2021**

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DESA WISATA KALONGAN DI KABUPATEN SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH

Angesti Nindya Cahyaningrum

NPP. 28.0629

Asdaf Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah

Program Studi Politik Pemerintahan

Email: nindyangesti@gmail.com

ABSTRACT

This research is aimed to answer the problem of how the development of tourism village, especially in Kalongan village as an object that has a top power for tourism in Semarang Regency and to know the supporting factors as well as the inhibition of the efforts undertaken by the relevant departement in attracting tourists. The purpose of this research is to know and analyze the role of the Department of Tourism in developing the tourism village of Kalongan Tourism Village, all supporting and inhibiting factors, and efforts undertaken by the Youth and Sports tourism office in overcoming the inhibitory factor in the development of tourism village. The research method used by the researcher in create this report is qualitative with inductive approaches as well as data collection techniques using documentation, interviews and observations. The respondent consists of the Head of Department of Tourism of Semarang Regency, Head of Sub Division tourist destination, Head of Sub Division of tourism Product development, Head of East Ungaran District, Head of Kalongan village, Head of BUMDes Kalongan, community leaders, tourist visitors and merchants seller in the tourism area of Kalongan village. The result of the research that the researcher found that in the implementation to developing the Kalongan Tourism village has been implemented by all stakeholders but the results was not maximum due to the inadequacy because there are several problems that is lack of human resources, infrastructure facilities, Pandemic of Covid-19, involvement of investors in the use for socialization and promotion activities through cultural events in order to promote tourism in Kalongan village.

Keywords: tourist village, Kalongan village, tourism, local society.

ABSTRAK

Penelitian ini ditujukan guna menjawab permasalahan mengenai bagaimana pengembangan desa wisata khususnya di desa kalongan sebagai obyek yang memiliki daya tarik bagi wisata di kabupaten semarang dan apa saja faktor pendukung serta

penghambat juga apa saja upaya yang dilakukan dinas terkait dalam menarik minat wisatawan.

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peranan Dinas Pariwisata dalam pengembangan desa wisata khususnya desa wisata kalongan, apa saja faktor pendukung dan penghambat, serta upaya yang dilakukan Dinas Pariwisata dalam mengatasi faktor penghambat dalam pengembangan desa wisata.

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan laporan ini adalah kualitatif dengan pendekatan induktif serta teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi, wawancara dan observasi. Responden terdiri dari Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, Kabid Destinasi Wisata, Kasi Pengembangan Produk Wisata, Camat Ungaran Timur, Kepala Desa Kalongan, Kepala BUMDes Kalongan, Tokoh masyarakat, Pengunjung wisata dan pedagang di Kawasan wisata desa kalongan.

Kesimpulan hasil yang Penulis berikan yaitu dalam pelaksanaan pengembangan desa wisata Kalongan telah dilaksanakan seluruh pihak terkait namun hasilnya masih belum optimal karena adanya beberapa permasalahan seperti sumber daya manusia, sarana prasarana, pandemi Covid-19, keterlibatan investor sehingga perlunya kegiatan sosialisasi dan promosi melalui event budaya untuk dapat memajukan pariwisata di Desa Kalongan.

Kata kunci: desa wisata, desa kalongan, pariwisata, penduduk lokal.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pariwisata merupakan salah satu aspek yang sangat penting bagi negara bagi negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pariwisata dapat mendatangkan devisa yang bernilai tinggi sebagai sumber pendapatan negara dalam melaksanakan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Richard Sihite dalam Marpaung dan Bahar (2000:46) memaparkan pariwisata merupakan perjalanan yang dilakukan seseorang dalam waktu singkat secara terencana dengan tujuan tamasya atau memenuhi keinginan yang lain.

Desa wisata merupakan kesatuan masyarakat yang tinggal di tempat yang sama dan saling berinteraksi untuk sama-sama pengelola tempat tinggalnya menjadi sebuah kawasan yang memiliki potensi wisata dan mengembangkannya dengan potensi-potensi lain. Masyarakat di desa wisata memiliki peran utama sebagai tuan rumah bagi para wisatawan sehingga sikap dan perilakunya mencerminkan nilai luhur bangsa

Indonesia yang ramah tamah. Masyarakat bisa memfasilitasi wisatawan melalui akomodasi yang mendukung perkembangan wisata misalnya berupa *homestay*, cinderamata, maupun jasa *tour guide* yang bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Peningkatan ekonomi tersebut dilakukan dengan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki.

Kebudayaan yang orisinal merupakan modal penting untuk memikat wisatawan. Wisatawan yang dimaksud adalah wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara. Wisatawan menderung memiliki rasa ingin tahu terhadap budaya dan tradisi yang dijalankan oleh masyarakat desa dimana notabene mereka terbiasa hidup di lingkungan yang modern dengan sosialisasi yang kurang. Tradisi yang unik dan berbeda dari daerah lain akan terlihat mencolok. Bukan hanya wisatawan mancanegara, bahkan wisatawan domestik sendiri pun belum tentu mengetahui semua budaya maupun tradisi yang dijalankan oleh banyak desa wisata di Indonesia. Rasa ingin tahu tersebut yang mendorong wisatawan untuk datang berkunjung secara berencana atau hanya mengisi kekosongan waktu.

Salah satu provinsi yang menggalakkan pengembangan Desa Wisata adalah Jawa Tengah. Menurut berita dalam [AntaraneWS](#) 20 Juli 2019 pukul 19:09 menyebutkan Jawa Tengah sendiri memiliki sekitar 353 desa wisata dari 7800 jumlah desa yang ada. Jumlah tersebut meningkat dari tahun 2019 yang berada di angka 229 desa wisata. Gubernur Jawa Tengah menargetkan sebanyak 500 desa wisata yang akan digarap hingga masa periode pemerintahannya berakhir. Pemerintah Daerah Jawa Tengah juga telah menyiapkan anggaran sebanyak 1 miliar untuk kategori desa wisata yang sudah maju dan ada 500 juta untuk desa wisata yang berada di tahap pengembangan atau baru muncul. Hal ini dilakukan dengan harapan masyarakat desa di Jawa Tengah mampu memberdayakan potensi wilayah mereka menjadi zona ekonomi yang bernilai jual. Desa wisata di Jawa Tengah memiliki tiga zona yang terdiri dari zona pegunungan, zona dataran, dan zona pantai.

Menurut berita yang diakses penulis di [AntaraneWS](#) pada 25 Oktober 2020 pukul 09.09 juga menjelaskan bahwa keberadaan desa wisata di Jawa Tengah diharapkan mampu

menjadi pendukung wisata bagi Candi Borobudur yang telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo menjadi salah satu destinasi prioritas nasional yang kebetulan terletak di Jawa Tengah. Terkhusus Kabupaten Semarang sendiri memiliki 54 objek wisata yang sudah mengantongi izin dan diantaranya ada 55 tempat yang tergolong merupakan desa wisata sehingga totalnya ada 109 destinasi pariwisata yang dapat dikunjungi. Mengingat Kabupaten Semarang yang letaknya berada di pegunungan sehingga mayoritas destinasinya menyuguhkan pemandangan alam dari dataran tinggi.

Salah satu desa wisata yang potensial adalah Desa Kalongan. Letaknya berada di Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang yang terdiri dari 12 dusun dimana ada 17 RW dan 86 RT yang memiliki luas wilayah 863,3 ha. Desa Kalongan berada sekitar 5,7 km dari pusat pemerintahan yang ada di Kantor Bupati. Desa Wisata Kalongan ini memiliki beberapa destinasi wisata yang letaknya berdekatan satu sama lain. Desa Wisata Kalongan telah memiliki potensi wisata yang mendukung untuk dikatakan sebagai “Desa Wisata”. Hal tersebut dinilai dari beberapa fasilitas penunjang pariwisata yang telah dibangun dan diprakarsai masyarakat desa setempat. Penunjang pariwisata tersebut berupa penginapan atau *homestay* di rumah penduduk, kuliner yang diujakan di Pasar Sawahan, dan cinderamata yang dijual dan dibuat oleh masyarakat. Beberapa destinasi wisata yang ada di Desa Wisata Kalongan adalah Curug Gending Asmoro, Pasar Sawahan, dan Khayangan tebing Alfath.

1.2. Permasalahan

Kepala Desa Kalongan Yarmuji menjelaskan jalan rusak merupakan masalah yang menjadi prioritas pemerintah saat ini. Ada sebagian wilayah di Desa Kalongan yang jalannya rusak serta berlubang dimana hal tersebut berkaitan dengan sarana prasarana pendukung pariwisata. Selain itu beliau sebagai penanggungjawab pengelolaan Desa Wisata Kalongan juga menjelaskan bahwa untuk saat ini transparansi mengenai pengelolaan administrasi di Desa Wisata Kalongan masih sangat minim dibuktikan dengan belum adanya laporan secara resmi mengenai jumlah pendapatan, pengeluaran, dan data pengunjung di beberapa tempat wisata di Kalongan dengan potensi pariwisata

alam yang bisa diolah sebagai usaha dalam peningkatan jumlah wisatawan di setiap tahunnya.

1.3. Penelitian Sebelumnya

Belum ada penelitian dalam bentuk jurnal maupun artikel yang ditulis mengenai topic penelitian yang saya ambil. Seperti yang kita tahu bahwa Desa Wisata Kalongan itu sendiri baru berdiri pada tahun 2017 sehingga merupakan desa wisata berkembang yang sedang digalakkan dalam proses pengembangannya.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni pengembangan Desa Wisata Kalongan yang dilakukan pemerintah daerah dengan BUMDes serta didukung oleh Pokdarwis Desa Kalongan.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai pengembangan Desa Wisata Kalongan yang dilakukan pemerintah daerah dengan BUMDes serta didukung oleh Pokdarwis Desa Kalongan.

II. METODE

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif melalui pendekatan induktif karena dianggap relevan dengan penelitian yang akan dilakukan mengenai Implementasi Kebijakan Pengembangan Desa Wisata Kalongan sehingga memperoleh hasil yang kongkrit di lapangan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara semiterstruktur dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber sesuai pedoman wawancara yang telah dibuat. Penulis menyimpulkan permasalahan dalam daftar pertanyaan sesuai topik pembahasan dalam penelitian yang disesuaikan terhadap kondisi di lapangan namun

pelaksananya bersifat fleksibel, artinya pertanyaan dapat menyesuaikan situasi dan kondisi dan materi yang tidak keluar dari permasalahan yang diamati. Adapun penentuan informan penulis menggunakan Teknik *Purposive Sampling* agar mendapatkan informasi lebih mendalam. Penelitian ini menggunakan triangulasi data dengan istilah *check*, *recheck*, dan *cross check*. Penulis membutuhkan triangulasi untuk menggabungkan sumber dan teknik pengumpulan data sehingga penelitian lebih bisa dipahami. Penulis juga melakukan cek dan cirek untuk menguji keabsahan data untuk menghindari kemelencengan data.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan bentuk pelaksanaan atau penerapan dari suatu kebijakan. Implementasi juga merupakan suatu tahapan dalam proses penyelenggaraan kebijakan publik, yang dilaksanakan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Suatu kebijakan publik akan menimbulkan suatu hasil (*outcome*) yang dapat dinikmati terutama sekelompok sasaran target (*target group*).

Pelaksanaan suatu kebijakan dapat dikatakan berhasil apabila terlaksananya tujuan yang ingin dicapai dari kehadiran suatu peraturan daerah. Dalam pelaksanaan penelitian, penulis mengaitkan proses implementasi pengembangan Desa Kalongan sebagai desa wisata yang memiliki daya tarik wisata di Kabupaten Semarang dengan konsep menurut Edward yang dikutip oleh Dyah dan Arif (2014: 38-44) menjelaskan mengenai empat variabel atau faktor kritis dalam implementasi kebijakan publik, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap kecenderungan) dan struktur birokrasi.”

3.2. Pengembangan Desa Wisata

Pengembangan desa wisata merupakan salah satu program pembangunan yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2014. Adapun mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih rinci dalam Peraturan Daerah. Bentuk tindak lanjut Pemerintah Daerah dalam mengurus masalah pariwisata adalah dengan

membuat kebijakan mengenai pengembangan daya Tarik wisata terkhusus dalam hal ini adalah terkait desa wisata.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah memberikan wewenang yang luas bagi penyelenggaraan urusan pemerintah yang terdiri atas pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat yang dilandasi oleh asas otonomi dan tugas pembantuan. Asas otonomi yang dimaksud adalah pemberian Otonomi Daerah dimana setiap daerah memiliki wewenang untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri diluar urusan pemerintahan pusat yang telah diatur oleh Undang-Undang.

Otonomi Daerah salah satunya diwujudkan dalam pembuat kebijakan oleh Pemerintah Daerah dimana kebijakan tersebut bertujuan memecahkan suatu permasalahan yang timbul. Terdapat beberapa permasalahan di Kabupaten Semarang yang selanjutnya diselesaikan dengan penerbitan Peraturan Daerah. Salah satunya adalah terkait pengembangan desa wisata. Tujuannya adalah untuk memberikan pedoman bagaimana desa dapat dijadikan sebuah desa wisata maupun bagaimana desa wisata yang sudah ada meningkatkan kualitasnya.

3.3. Desa Wisata Kalongan

Dalam penetapan desa wisata selanjutnya diatur lebih rinci dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah dimana dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah ini memberikan kejelasan mengenai kelembagaan desa wisata, Penetapan desa wisata, Klasifikasi desa wisata, Pemberdayaan desa wisata, Pembinaan dan pengawasan, serta forum komunikasi desa wisata.

Pelaksanaan suatu kebijakan dapat dikatakan berhasil apabila terlaksananya tujuan yang ingin dicapai dari kehadiran suatu peraturan daerah. Dalam pelaksanaan penelitian, penulis mengaitkan proses implementasi pengembangan Desa Kalongan sebagai desa wisata yang memiliki daya tarik wisata di Kabupaten Semarang dengan

konsep menurut Edward yang dikutip oleh Dyah dan Arif (2014: 38-44) menjelaskan mengenai empat variabel atau faktor kritis dalam implementasi kebijakan publik, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap kecenderungan) dan struktur birokrasi.”

Tabel 3.1

Masalah yang dihadapi Desa Kalongan tahun 2020

No	Masalah	Urutan
1.	Minimnya SDM	II
2.	Drainase kurang maksimal	IV
3.	Jalan rusak	I
4.	Adanya perubahan lahan non-terbangun menjadi terbangun	III

Sumber : Desa Kalongan Tahun 2021

Data di atas menunjukkan bahwa masalah jalan rusak merupakan masalah utama yang dimiliki oleh Desa Kalongan dan ada keterkaitan antar masalah yang dapat menjadi penghambat dalam pengembangan pariwisata. Masih banyak jalanan rusak dan berlubang yang berbahan dasar batu dan tanah sehingga apabila hujan deras maka jalanan akan menjadi licin dan becek sehingga membahayakan pengguna jalan. Terlebih kalau jalanan tersebut semakin sering dilewati oleh kendaraan bermuatan berat. Infrastruktur merupakan hal yang perlu diperbaiki untuk kemudahan akses bagi para wisatawan yang datang berkunjung. Pembangunan sarana dan prasarana bagi Desa Wisata Kalongan bersumber dari APBDes yang telah direncanakan sebelumnya. Namun dalam pembangunan itu sendiri tidak bisa langsung dijalankan semuanya dalam satu waktu, sehingga dalam membangun infrastruktur pun butuh proses yang panjang sampai akhirnya dapat terpenuhi secara maksimal. Hal ini bersifat terbatas karena aliran dana untuk Desa Wisata Kalongan masih terhambat karena hanya mengandalkan pada satu sumber dana yaitu APBDes. Padahal Pemerintah Daerah Jawa Tengah sendiri telah menyiapkan dana khusus bagi desa-desa yang memiliki potensi wisata.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Desa Wisata Kalongan melalui tahapan yang panjang untuk melengkapi persyaratan dalam penilaian dari Pemerintah Provinsi untuk dijadikan desa wisata. Desa Kalongan ditetapkan menjadi desa wisata melalui Surat Keputusan Bupati Semarang Nomor: 556/0389/2020 tentang Penetapan desa wisata Di Kabupaten Semarang. Dan setelah penetapan tersebut justru terjadi pandemi covid-19 yang berpengaruh terhadap operasional wisata di Desa Wisata Kalongan.

3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor pendukung dan faktor penghambat yang berpengaruh terhadap pengembangan Desa Wisata Kalongan. Ada beberapa faktor pendukung dan penghambat namun yang paling berpengaruh adalah adanya pandemic Covid-19 yang membuat wisata lumpuh di Kabupaten Semarang.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil magang dan penelitian yang Penulis laksanakan di Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, serta analisis data, fakta, wawancara, dan informasi yang terkumpul, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Implementasi Pengembangan Desa Wisata Kalongan sebagai sebuah desa wisata rintisan yang dikelola oleh BUMDes serta Pokdarwis masih kurang optimal dikarenakan:
 - a. Komunikasi belum maksimal dilihat dari aspek kejelasan dimana telah ada Peraturan Gubernur Jawa Tengah mengenai pemberdayaan desa wisata sedangkan pada aspek transmisi masih ada masyarakat yang belum tahu mengenai penetapan Desa Wisata Kalongan terakhir dari aspek konsistensi yaitu adanya dukungan dari pemerintah yaitu DRPD Kabupaten Semarang mengenai pengembangan desa wisata;

- b. Sumber daya kurang efektif dilihat dari aspek staf yang kurang memadai, aspek informasi yang belum tersampaikan dibuktikan adanya masyarakat yang belum tau mengenai Desa Wisata Kalongan, aspek wewenang yang baik dimana terdapat partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata, serta aspek fasilitas yang kurang ditandai adanya jalan rusak;
- c. Disposisi yang belum dilaksanakan dengan baik ditandai pada aspek pengangkatan birokrat yang belum memadai serta aspek intensif dimana tidak ada intensif khusus dalam melakukan pengembangan desa wisata;
- d. Struktur birtokrasi yang belum maksimal ditandai dengan aspek *Standart Operasional Procedur* (SOP) yang telah dilaksanakan sesuai SK Bupati Semarang mengenai penetapan Desa Wisata Kalongan serta aspek fragmentasi dimana kurang adanya upaya dari pemerintah dan masyarakat dalam mencari investor.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat

a. Faktor Pendukung

- 1) Adanya kejelasan peraturan dalam mengembangkan desa wisata sesuai Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata;
- 2) Besarnya potensi alam untuk pengembangan desa wisata;
- 3) Terdapat komitmen dari pimpinan daerah seperti Bupati Semarang, DPRD Kabupaten Semarang, serta Dinas Pariwisata dalam pengembangan desa wisata;
- 4) Adanya kesadaran dari masyarakat dalam pengembangan desa wisata dengan membuat kelompok sadar wisata (Pokdarwis).

b. Faktor Penghambat

- 1) Birokrat yang kurang kompeten dengan bidang pariwisata;
- 2) Akses jalan yang rusak dan sinyal telepon yang sulit;
- 3) Belum adanya pihak ketiga atau investor untuk ikut mengembangkan desa wisata Kalongan;

- 4) Pandemi Covid-19 yang membuat penutupan sejumlah tempat wisata dan membatasi pengunjung.
3. Upaya yang Dilakukan dalam Mengatasi Faktor Penghambat
 - a. Pemberdayaan Sumber Daya Aparatur sebagai penggerak pengembangan desa wisata;
 - b. Pembangunan dan perbaikan sarana prasarana di Desa Kalongan seperti pembenahan jalan dan signal telepon;
 - c. Melakukan pameran desa wisata guna menarik investor;
 - d. Menerapkan dan mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan dalam menanggulangi Covid-19 di tempat wisata.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu kelurahan saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan teori Implementasi dari Edward III.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pengembangan Desa Wisata Kalongan oleh peneliti lain di Kabupaten Semarang.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2001. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Abidin, Said Zinal. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Salemba Humanika
- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Pustaka Setia

Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta

Arjana, I Gusti Bagus. 2017. *Geografi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*. Bandung: Rajagrafindo Persada.

Budi, Winarno. 2005. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Bungin, Burhan. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi ke 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Dyah dan Arif. 2014. “Implementasi Kebijakan Otonomi Pelayanan Pendidikan” dalam Dyah Mutiarin dan Arif Zaenudin (Eds.) *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Fandeli, C. Raharjana, D.T. Kaharudin. 2003. *Pengembangan Kawasan Pedesaan sebagai Objek Wisata Yogyakarta*: Lembaga Penelitian Universitas Gadjah Mada.

Marpaung, Happy dan Bahar. 2000. *Pengantar Pariwisata*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Moleong, Lexy J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Mulyadi, Mohammad. 2014. *Metode Penelitian Praktis Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Publica Institute.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2017-2027

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah

Priasukmana, Soetarso. R. Mohamad Mulyadin. 2001. Pembangunan Desa Wisata: Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah, Info Sosial Ekonomi, vol 2, No.1, 2001

Sedarmayati. 2009. *Membangun dan Mengembangkan Kebudayaan dan Industri Pariwisata*. Bandung: Refika Aditama.

Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.

Simangunsong, Fernandes. 2016. *Metode Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta
Subagyo, Joko. 2006. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sunaryo, Bambang. 2013. *Kebijakan Pengembangan Destinasi Wisata*. Yogyakarta: Gava Media.

Surat Keputusan Bupati Semarang Nomor: 556/0389/2020 tentang Penetapan Desa Wisata Di Kabupaten Semarang

Syafri, Wirman dan P. Israwan Setyoko. 2010. *Implementasi Kebijakan Publik dan Etika Profesi Pamong Praja*. Sumedang: Alqa Prisma Interpelita.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Utama, I Gusti Bagus Rai. 2017. *Pemasaran Pariwisata*. Yogyakarta: Andi Offset.